

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Balai Besar Riset

Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

1.1. Kondisi umum

Berdasarkan SK. Menteri Kelautan dan Perikanan No.22/PERMEN-KP/2017 tertanggal 27 Maret Tahun 2017 di Jakarta tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP), yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Eselon I BRSDM dan dibina secara teknis oleh Pusat Riset Perikanan (Puriskan).

BBRBLPP telah berhasil mengembangkan teknologi perbenihan beberapa spesies ikan laut, krustase dan kekerangan bahkan pembenihan ikan bandeng dan kerapu telah berkembang ditingkat petani dengan prototype hatcheri skala rumah tangga (HSRT). Dewasa ini tidak kurang dari 6,700 bak hatcheri di Kabupaten Buleleng secara fleksibel dan aktif melakukan kegiatan produksi benih bandeng maupun kerapu bebek dan kerapu macan. Keberhasilan ini telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Namun demikian, masih teridentifikasi berbagai masalah teknis yang menghambat perkembangan budidaya laut antara lain mutu induk, telur, benih, penyakit, pakan dan teknologi budidaya pembesaran. Oleh karena itu, penelitian yang berkaitan dengan permasalahan tersebut perlu lebih diintensifkan.

Selain penelitian untuk mengatasi berbagai kekurangan pada berbagai aspek budidaya, penelitian terapan dalam rangka pengembangan kawasan budidaya laut perlu mendapat porsi yang lebih besar. Hal ini perlu dilakukan agar penelitian skala laboratorium dapat diterapkan pada skala usaha sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pembudidaya. Sekitar 30 jenis ikan dan non-ikan yang telah dan sedang diteliti di BBRBLPP pada tahun 1984-2009 namun teknologi perbenihan secara utuh dengan penerbitan petunjuk teknis

baru dilakukan pada 12 jenis yaitu udang windu (*Penaeus monodon*), Udang vannamei (*Litopenaeus vannamei*), bandeng (*Chanos chanos*), kerapu bebek (*Cromileptis altivelis*), kerapu sunu (*Plectropomus leopardus*), Kerapu raja sunu (*Plectropoma laevis*), kerapu macan (*Ephinephelus fuscoguttatus*), kerapu batik (*E. microdon*), kerapu lumpur (*E. coioides*), kakap merah (*Lutjanus argentimaculatus*), kepiting bakau (*Scylla paramamosain*), rajungan (*Portunus pelagicus*), dan teripang (*Holothurea scabra*).

Tugas pokok BBRBLPP adalah melaksanakan riset strategis dalam bidang budidaya laut meliputi: perbenihan dan genetika populasi, nutrisi dan teknologi pakan, kesehatan ikan, lingkungan dan toksikologi, teknologi budidaya dan penyuluhan perikanan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BBRBLPP dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar dan dibantu oleh Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional. Secara struktural Bagian dan Subbagian pada BBRBLPP adalah sebagai berikut.

1.1.1 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya, BBRBLPP dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Balai dibantu oleh Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang membawahi subbagian/seksi sebagai berikut:

A. Bagian Tata Usaha

- Bagian Tata Usaha Mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga
- Menyelenggarakan fungsi : pelaksanaan urusan kepegawaian, administrasi jabatan fungsional dan tata laksana, Pelaksanaan urusan keuangan, persuratan, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

(A.1). Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian, dengan tugas melakukan urusan kepegawaian administrasi jabatan fungsional dan tata laksana.

(A.2). Sub Bagian Keuangan dan Umum Subbagian Keuangan dan Umum dengan tugas melakukan urusan keuangan persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan

B. Bidang Tata Operasional

- Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran pengumpulan data, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.
- Menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana program dan anggaran pengumpulan data, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan pelaporan.

(B.1). Seksi Program dan Anggaran

Seksi Program dan Anggaran, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran.

(B.2). Seksi Monitoring dan Evaluasi

Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pengumpulan data, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan.

C. Bidang Pelayanan Teknis, Sarana dan Penyuluhan

- Bidang Pelayanan Teknis dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan persiapan kerjasama, pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, publikasi serta pengelolaan prasarana dan sarana penelitian dan pengembangan budidaya laut.
- Menyelenggarakan fungsi persiapan kerjasama, pelayanan teknis, jasa diseminasi, informasi, komunikasi, publikasi hasil penelitian dan pengembangan budidaya laut serta pengelolaan perpustakaan.
- Pengelolaan prasarana dan sarana riset budidaya laut

(C.1) Seksi Kerjasama dan Pelayanan Riset

Seksi kerjasama dan pelayanan Riset, informasi, komunikasi publikasi hasil riset dan pengembangan budidaya laut, serta pengelolaan.

(C.2). Seksi Prasarana dan Sarana

Seksi Prasarana dan sarana mempunyai tugas melakukan pengelolaan prasarana dan sarana penelitian dan pengembangan budidaya laut.

(C.3) Seksi Penyuluhan

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengelolaan berkaitan dengan tugas dan fungsi para penyuluh perikanan di lapangan.

D. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Peneliti, Teknisi Litkayasa, Pustakawan, Arsiparis dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk pelaksanaan kegiatan penelitian, pada tingkat BBRBLPP dibentuk empat kelompok peneliti yaitu kelompok genetika, breeding dan bioteknologi, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi budidaya serta kesehatan ikan. Selain tenaga fungsional peneliti, jabatan fungsional non peneliti yaitu jabatan fungsional teknisi litkayasa, pustakawan, arsiparis, dan pranata komputer.

STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN, GONDOL – BALI



Gambar 1. Struktur Organisasi BBRBLPP

1.1.2. Sumber Daya Penelitian dan Pengembangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BBRBLPP ditunjang oleh sumber daya manusia, sumber daya fisik, dan sumber daya keuangan. Sumber daya manusia terdiri atas tenaga fungsional peneliti, penyuluh maupun tenaga fungsional lainnya dan tenaga administrasi. Sumber daya fisik berupa aset Balai yang meliputi tanah, bangunan kantor, guest house, prosesing, hatchery, kolam percobaan, laboratorium, ruang pertemuan, dan perpustakaan. Sumber daya keuangan dalam pengelolaan riset, penyuluhan, dan pengembangan perikanan budidaya laut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, pendanaan penelitian dapat berasal dari kegiatan kerjasama riset dengan institusi dalam negeri maupun luar negeri.

Bertitik tolak dari Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang klasifikasi potensi sumberdaya perikanan secara umum dibedakan menjadi sumber daya terbarukan (renewable resources) dan tidak terbarukan (non-renewable resources). Sumberdaya terbarukan meliputi perikanan (perikanan tangkap dan budidaya), mangrove, terumbu karang, padang lamun, mineral air laut dan air laut dalam, energi gelombang, pasang surut, angin dan OTEC (ocean thermal energy conversion). Sumber daya tidak terbarukan (non-renewable resources) meliputi minyak dan gas bumi serta berbagai jenis mineral yang terkandung didalamnya.

Potensi pengembangan budidaya perikanan laut memiliki prospek yang sangat tinggi untuk dikembangkan. Hal ini didukung oleh kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan serta memiliki sumberdaya berbagai spesies ikan ekonomis penting. Komoditas potensial budidaya laut yang mempunyai daya saing tinggi antara lain ikan tuna sirip kuning, kakap putih, kerapu sunu, abalone, teripang, dan lobster untuk dikembangkan sangat menjanjikan. Oleh karena itu, penelitian mengenai berbagai aspek budidaya beberapa komoditas tersebut perlu dilakukan secara ilmiah.

Peningkatan produksi perikanan dapat dicapai melalui inovasi teknologi yang efektif dan efisien, berdaya saing tinggi serta berkelanjutan. Berbagai komponen dan paket teknologi perikanan telah banyak dihasilkan oleh BBRBLPP yang dihasilkan ini harus segera secara intensif dikomunikasikan kepada pengguna agar dapat diimplementasikan dalam usaha yang riil sebagai upaya peningkatan efisiensinya. Aplikasi teknologi yang lebih inovatif akan menjadikan sektor perikanan menjadi ladang usaha yang lebih menarik bagi masyarakat untuk dijadikan sumber penghasilan yang menguntungkan.

Prospek pengembangan perikanan sebagai unit usaha sangat terbuka lebar mengingat melimpahnya sumber daya ikan yang dapat dijadikan sebagai bahan atau modal awal usaha tersebut serta tersedianya paket teknologi perikanan yang tepat guna. Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan telah menghasilkan paket teknologi pembenihan seperti kepiting, rajungan, ikan kobis, kakap merah, ikan kudi dan udang windu. Sedangkan terdapat komoditas yang masih digunakan dalam kegiatan riset di tahun 2019 diantaranya adalah tuna sirip kuning, lobster laut, ikan kerapu sunu, kakap putih, teripang dan abalone. Potensi SDM Penyuluhan yang tersebar di 4 Provinsi yaitu Bali, NTB, NTT dan Kalimantan tengah menjadi ujung tombak pengembangan teknologi yang dihasilkan oleh BBRBLPP.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.2. Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program riset Perikanan untuk mendukung pembangunan KP adalah belum tersedianya kerangka regulasi yang mengikat untuk pemanfaatan hasil riset oleh ditjen teknis sebagai landasan penyusunan kebijakan, sehingga peran BRSDM sebagai *Inhouse Consultant* lebih optimal, belum tersedia. Disini lain menurunnya fokus riset untuk upaya antisipatif dari BBRBLPP untuk menjawab permasalahan yang dihadapi perikanan budidaya laut saat ini antara lain; penurunan kualitas benih, merebaknya berbagai macam penyakit yang terdapat pada ikan laut dan udang, ketersediaan benih dan induk unggul yang belum memadai, pakan yang tidak efektif

dan mahal, penurunan kualitas lingkungan serta perubahan iklim global yang mempengaruhi tingkat produktivitas dan keberlanjutan perikanan laut.

Strategi untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut di atas adalah melalui penelitian yang bersifat dasar, terapan maupun pengembangan untuk menemukan teknologi tepat guna dalam perbenihan dan pembesaran ikan laut serta pengembangan kapasitas SDM yang kompeten.

Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan merupakan acuan bagi pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi perikanan budidaya laut serta sintesis kebijakannya. Dengan demikian, teknologi dan kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan dalam mengantisipasi berbagai dampak dari pengaruh eraglobalisasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II.

VISI-MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Dalam upaya pencapaian target pembangunan yang telah diprogramkan oleh Kementerian Kelautan dan perikanan tersebut, BBRBLPP sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Pusat Riset, Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, membuat program kerja dan arah kebijakan yang dituangkan dalam visi, misi, serta sasaran strategis yang mendukung pada arah kebijakan Pusat Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yaitu:

2.1. VISI

Dalam upaya pencapaian target pembangunan yang telah diprogramkan oleh Kementerian Kelautan dan perikanan BBRBLPP sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Pusat Riset Perikanan dan Pusat pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan, membuat program kerja dan arah kebijakan yang dituangkan dalam visi, misi, serta sasaran strategis yang mendukung pada arah kebijakan Pusat Riset Perikanan, Pusat pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan serta BRSDM KP.

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan

Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur.

Visi Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Visi BRSDM pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Visi Puslatluh KP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP dan visi BRSDM yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Visi dari BBRBLPP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong..

2.2. MISI

Misi BBRBLPP adalah menjalankan misi Presiden, KKP dan BRSDM dalam bidang kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden, KKP mendukung 4 (empat) misi yaitu :

1. Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan

2. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
 3. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
 4. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.
- Ketiga misi di atas dilakukan secara bertanggung jawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

2.3. Tujuan

Tujuan yang diharapkan adalah penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi BBRBLPP dalam rangka mencapai sasaran strategis pembangunan sektor perikanan 2020 – 2024 adalah :

- Meningkatkan kompetensi SDM riset dan penyuluhan perikanan guna meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk perikanan secara optimal.
- Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.
- Meningkatkan kapasitas dan kemandirian kelompok pelaku utama/usaha Kelautan dan Perikanan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup melalui kegiatan penyuluhan
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan.

1.4. Sasaran Strategis

Tujuan yang diharapkan adalah penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi BBRBLPP dalam rangka mencapai sasaran strategis pembangunan sektor perikanan 2020 – 2024 adalah :

Meningkatkan kompetensi SDM riset dan penyuluhan perikanan guna meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk perikanan secara optimal.

Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing

Meningkatkan kapasitas dan kemandirian kelompok pelaku utama/usaha Kelautan dan Perikanan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup melalui kegiatan penyuluhan

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan.

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN PERIKANAN

Fokus RPJMN periode IV (2020-2024) dalam siklus RPJPN 2005-2025 adalah untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan tersebut diprioritaskan untuk memperkuat struktur perekonomian berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas serta berdaya saing. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Agenda Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan.
3. Agenda Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Agenda Membangun Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Agenda Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar.
6. Agenda Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

7. Agenda Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam rangka melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional (Prioritas Nasional) RPJMN 2020-2024, telah disusun Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Major Project di KKP yaitu Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng, dan Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional. Selain itu KKP juga mendukung mayor project lainnya antara lain terkait dengan pariwisata dan Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.

Agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah arahan pembangunan nasional yang mempunyai visi “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Agenda pembangunan Nasional ini harus diimplementasikan oleh kementerian yang ada sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dua diantaranya mempunyai kaitan langsung yang penting dengan Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan. Pertama adalah tentang meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Sedangkan yang kedua adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, agenda nasional tersebut telah dilengkapi dengan program “quick wins” yaitu program yang diharapkan dapat menjadikan pendongkrak keberhasilan dalam mewujudkan visi pembangunan nasional. Isu dan fokus kegiatan riset pada Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan didasarkan pada penetapan isu kegiatan BRSDM KP. Adapun isu kegiatan BRSDM KP didasarkan pada arah kebijakan nasional dengan mempertimbangkan agenda riset nasional, Rencana Kerja Pemerintah, issue KP baik regional dan internasional serta kebutuhan eselon I lingkup KKP.

Strategi Agenda Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas KKP antara lain adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, yang meliputi Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, memperkuat komitmen pelaksanaan target SDG 14 Ekosistem Lautan (Life Below Water), dan Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan strategi penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi pertanian dan perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);
3. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan strategi konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati di daratan maupun pesisir, perlindungan kerentanan pesisir dan sektor kelautan, dan pengembangan rendah karbon pesisir dan laut.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BBRBLPP)

Arah dan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, adalah sebagai berikut :

Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan. Arah kebijakan ini menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan Kontribusi Ekonomi sektor KP (DJPT)

Mengoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses permodalan, dan perlindungan usaha budidaya.

Arah kebijakan menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan kontribusi ekonomi sektor KP (DJPB)

Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk, penguatan sistem karantina ikan, peningkatan nilai tambah untuk peningkatan devisa. Arah kebijakan menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan kontribusi ekonomi sektor KP. (DJPDS, BKIPM).

Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait Arah kebijakan menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (PRL, PSDKP dan BKIPM).

Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:

Penguatan kegiatan riset yang dimanfaatkan oleh masyarakat, inovasi teknologi dan riset kemaritiman, kelautan dan perikanan, serta peningkatan database kelautan dan perikanan.

Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil Riset, diseminasi teknologi perikanan dan kelautan yang berkelanjutan dan produktif, Pengembangan/pembentukan pusat unggulan riset kelautan dan perikanan;

Pengembangan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, termasuk yang berbasis digital;

Pengembangan kewirausahaan perikanan, pengembangan angkatan kerja perikanan generasi milenial, peningkatan daya saing SDM kelautan dan perikanan melalui diklat agar dapat terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri serta membentuk startup (usaha rintisan), penguatan literasi maritim,

Pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan yang bersertifikasi kompetensi

Pembentukan kelompok kelautan dan perikanan mandiri Penguatan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan

Peningkatan sarana dan prasarana riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan; Peningkatan UPT riset, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020 – 2024 adalah:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
2. Gender
3. Modal Sosial Budaya;
4. Transformasi Digital

Pengarusutamaan dalam Renstra 2020-2024 KKP mengacu pada Dokumen RPJMN 2020-2024 yang telah menetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pembangunan inovatif adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan.

Keempat mainstreaming ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif.

Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan

3.2.1 ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2020–2024

Arah kebijakan BRSDM KP 2020-2024 mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan nasional (RPJMN) dan arah kebijakan pembangunan KP yang ada. Berdasarkan penjabaran strategi pembangunan KP 2020 – 2024, strategi penguatan daya saing SDM, inovasi teknologi dan riset merupakan prioritas utama BRSDM KP yang diperoleh dari hasil analisis SWOT. Upaya yang akan dilaksanakan untuk memenuhi hal tersebut diantaranya adalah:

1. Menyelenggarakan riset untuk menyelesaikan isu dan permasalahan.
2. Meningkatkan peran riset serta inovasi teknologi dalam mendukung percepatan pembangunan kelautan dan perikanan.
3. Meningkatkan diseminasi hasil riset sesuai dengan upaya pengembangan industri kelautan dan perikanan.

4. Membangun hubungan melalui jaringan kemitraan dalam kerangka kerjasama riset dan industri.
5. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi dan pelatihan sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
6. Meningkatkan kompetensi ASN KP yang unggul dan berdaya saing global.
7. Membangun sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan berbasis digital.
8. Membangun sistem penyuluhan yang bersinergi dengan riset dan pengembangan SDM.
9. Memperkuat kelembagaan dan manajerial riset dan SDM

BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja KKP Tahun 2020 – 2024

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		T A H U N			
		2020	2021	2022	2023
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE					
SS 1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP					
1	Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP	59,16	60,31	61,47	62,66
CUSTOMERS PERSPECTIVE					
SS 2. Ekonomi sektor KP yang meningkat					
2	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7,9	8,11	8,31	8,51
3	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	6,17	6,43	6,86	7,27
4	Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	56,39	58,08	59,53	61,02
SS 3. Sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan					
5	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	≤53,7	≤80	≤80	≤80
6	Luas Kawasan konservasi (juta Ha)	23,4	24,1	25,1	26

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
SS 4. Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat						
7	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri	17.175	17.696	18.296	18.916	19.546
SS 5. Hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan						
8	Jumlah hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan (paket)	5	10	10	10	15
SS 6. Tatakelola SDKP yang bertanggung jawab						
9	WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola	3	5	7	11	11
10	Jumlah penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir	24				102
SS 7. Industrialisasi KP yang berdaya saing						
11	Produksi perikanan (juta ton)	26,46	27,86	29,39	30,98	32,72
12	Produksi garam rakyat (juta ton)	3	3,1	3,2	3,3	3,4
SS 8. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif						
16	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i>	54,18	60	65	70	75
17	Persentase Kepatuhan (<i>Compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	89	90	91	92	93
18	Indeks efektifitas operasi armada pengawasan SDKP	7,85	7,95	8,05	8,15	8,25
19	Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%)	77	79	81	82	82
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE						
SS 9. Tatakelola pemerintahan yang baik						
20	Indeks profesionalisme ASN (indek)	72	73	74	75	76
21	Indeks SPBE	70	71	72	73	74
22	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KKP	85	85	85	85	85
23	Level maturitas SPIP	3	3	3	3	3
24	Nilai kinerja anggaran KKP	Baik (80-90)	Baik (80-90)	Baik (80-90)	Sangat Baik (>90)	Sangat Baik (>90)
25	Predikat Sakip KKP	A	A	A	A	A
26	Opini atas Laporan Keuangan KKP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Paparan Rancangan Teknokratik Renstra KKP Tahun 2020 - 2024

4.2 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan BBRBLPP Tahun 2020-2024

Renstra ini merupakan penjabaran operasional dari Pusat Riset perikanan (Puriskan) dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (Puslatluh) yang membutuhkan percepatan dalam pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk dapat mewujudkan sasaran kegiatan, BBRBLPP menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BBRBLPP TA 2020 - 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				2020	2021	2022	2023	2024
SS1	Terlaksananya pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	IKU 1	Jumlah Kelompok Pelaku Utama/ Usaha yang disuluh (kelompok)	4.609	4.609	4.809	4.909	5.009
		IKU 2	Jumlah kelompok yang dinilai kelas kelompoknya di Satminkal BBRBLPP (kelompok)	200	200	200	200	200
		IKU 3	Calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi kelompok pelaku utama perikanan di Satminkal BBRBLPP (kelompok)	210	210	210	210	210
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				2020	2021	2022	2023	2024
SS3	Hasil riset dan inovasi BBRBLPP yang dimanfaatkan	IKU 4	Jumlah Teknologi Hasil Riset KP yang dihasilkan	6	3	6	6	6
		IKU 5	Jumlah Produk Biologi yang	2	-	-	-	-

			dihasilkan					
		IKU 6	Jumlah Lembaga Riset Perikanan yang terstandar	1	1	1	1	1
		IKU 7	Jumlah sarana dan prasarana BBRBLPP yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	1	1	1	1	1
		IKU 8	Jumlah jejaring dan/atau kerjasama BBRBLPP yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	4	3	4	4	4
		IKU 9	Jumlah Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang dipublikasikan (Buah)	18	20	20	20	20
SS3	Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat	IKU 10	Tersedianya Metode Percontohan Penyuluhan KP (lokasi)	1	1	4	5	6
		IKU 11	Pembinaan Usaha Kecil Mikro dan Koperasi sektor KP	648	-	648	648	648
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE				2020	2021	2022	2023	2024
SS4	Tata kelola pemerintahan BBRBLPP yang baik	IKU 12	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BBRBLPP (indeks)	72	73	72	72	72
		IKU 13	Persentase unit kerja BBRBL-PP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	82	84	82	82	82

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan yang merupakan entitas pelaporan dari Satuan Kerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Balai Besar Penelitian Budidaya Laut adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset

Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan	

	Piutang Negara/DJKN	
--	---------------------	--

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset
Tetap*

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan

penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan

disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset

Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikuangi akumulai penyusutan.

Kewajiban

- **Kewajiban**

- Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Satker Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) revisi ke-8 dari DIPA awal. Hal ini di sebabkan karena adanya perubahan penambahan anggaran dari pemanfaatan dana PNBP, penyesuaian halaman 3 DIPA, pergeseran belanja pegawai/pemenuhan kekurangan belanja pegawai Poltek KP Jembrana, Pergeseran antar Satker, pemanfaatan potensi sisa belanja pegawai, Pemutakhiran KPA (Revisi POK).

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penerimaan Perpajakan	512.790.000	442.540.928
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	-
Jumlah Pendapatan	512.790.000	442.540.928
Belanja		
Belanja Pegawai	54.576.641.000	52.365.511.000
Belanja Barang	20.780.071.000	21.262.131.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Belanja Modal	168.249.000	168.249.000
Jumlah Belanja	75.524.961.000	73.795.891.000

Realisasi
Pendapatan
Rp.793.896.900.-

B.1 Pendapatan Penerimaan Negara BukanPajak

Realisasi Pendapatan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk periode yang berakhir pada Tahun 2023 adalah sebesar **Rp.793.896.900.-** atau mencapai 86.00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp.501.975.000.-**. Pendapatan Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan terdiri dari pendapatan pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan, pendapatan jasa tenaga,pekerjaan,informasi, pelatihan dan teknologi serta pelepasan asset non lancar.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan penjualan hasil pertanian perkebunan peternakan dan budidaya	57.000.000	475.664.600	-
Pend.sewa tanah, gedung dan bangunan	25.000.000	83.367.722	-
pendapatan penggunaan dari sarana dan prasarana sesuai tusi	-	-	-
Pendapatan penelitian /Riset ,survey, pemetaan dan pengembangan iptek	-	-	-
Pendapatan dari pemindahan BMN		66.669.999	
Pendapatan pengujian,sertifikasi kalibrasi dan standarisasi lainnya	419.975.000	-	
Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah		-	
Pendapatan penjualan peralatan dan mesin		97.899.999	
Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	-	70.294.580	-
Penerimaan kembali belanja barang TAYL	-	-	-
Penerimaan kembali belanja Modal TAYL	-	-	-
Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah	-	-	-
Denda keterlambatan pekerjaan	-	-	-
Jasa giro	-	-	-
Jumlah	501.975.000	793.896.900	-

Realisasi pendapatan PNPB Tahun 2023 selain dari perolehan umum berupa pendapatan sewa,pemindahan BMN,sewa aset, penjualan hasil peralatan dan mesin serta penerimaan kembali belanja pegawai tahun yang lalu juga berasal dari pada optimalisasi aset berupa bak pemeliharaan ikan,KJA, tambak dan plasma nuftah berupa induk ikan dan kultur murni pakan alami. Secara keseluruhan sebagian besar pendapatan fungsional PNPB berasal dari penjualan hasil proses pembenihan,pendederan dan pembenihan ikan laut.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik (Turun) %
	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	
Pendapatan penjualan hasil pertanian perekubunan,peternakan dan budidaya	475.664.600	8.749.600	
Pendapatan sewa gedung dan bangunan	83.367.722	171.959.600	
Pendapatan Penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi	-	7.200.000	
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	97.899.999	-	
Pendapatan pengujian sertifikasi kalibrasi dan standarisasi	-	236.760.000	
Pendapatan penelitian /riset/pemetaan dan pengembangan iptek	-	4.500.000	
Pendapatan jasa tenaga,pekerja dan informasi	-	-	
Pendapatan jasa lembaga keuangan	-	-	
Pendapatan pemindahan BMN Lainnya	66.669.999	-	
Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah	-	220.000	
Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran lalu	70.294.580	12.751.728	
Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran lalu	-	400.000	
Jumlah	793.896.900	442.540.928	

*Realisasi Belanja
Negara Rp.
72.831.902.761-.*

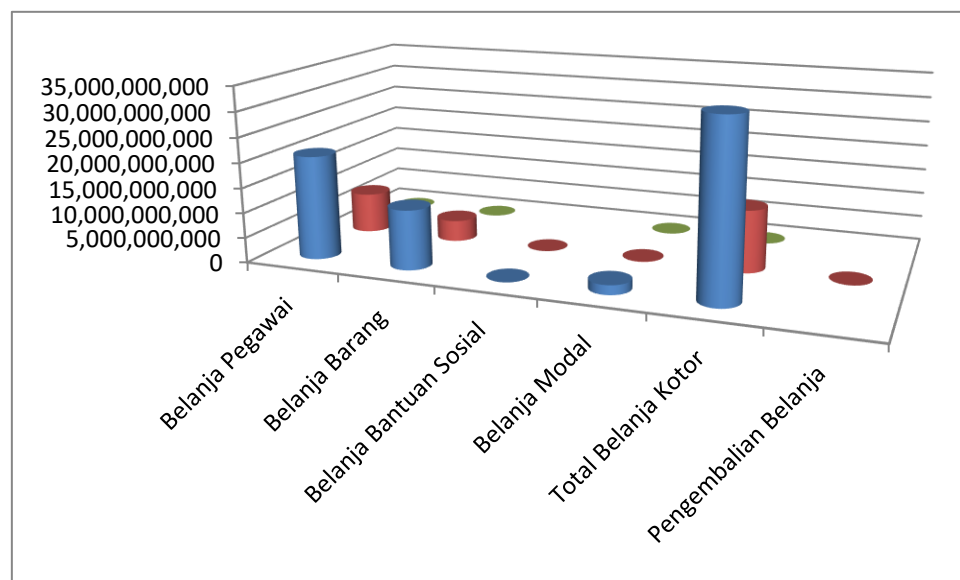
B.2. Belanja

Realisasi Belanja TA 2023 adalah sebesar **Rp.72.831.902.761-.** atau 99,00 persen dari anggaran belanja sebesar **Rp.73.795.891.000-.** Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Tahun 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	52.365.511.000	51.869.741.300	100,00
Belanja Barang	21.262.131.000	20.793.974.001	99,00
Belanja Bantuan Sosial	-	168.214.460	
Belanja Modal	168.249.000	74.910.000	61,00
Total Belanja Kotor	73.795.891.000	72.906.839.761	98,80
Pengembalian Belanja			
Jumlah	73.795.891.000	72.906.839.761	99,00

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja TA 2023 tidak mengalami penurunan dibandingkan dengan TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
	31 Des 2023	31 Des 2022	
Belanja Pegawai	51.869.714.300	59.604.647.661	-
Belanja Barang	20.793.974.001	16.869.505.947	-
Belanja sosial		-	-
Belanja Modal	168.214.460	74.910.000	-
Jumlah	72.831.902.761	76.549.063.608	-

Belanja Pegawai Rp. 51.869.714.300..

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.51.869.714.300.-** dan **Rp.59.604.647.661.-**. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil

(PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2022.

Perbandingan Belanja Pegawai tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	26.204.625.227	31.388.040.611	54,11
Belanja Tunjangan kinerja	25.578.261.073	28.141.814.050	-
Belanja Honorarium		0	-
Belanja Lembur	86.828.000	74.693.000	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	51.869.714.300	59.604.547.661	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	51.869.714.300	59.604.547.661	54,11

*Belanja Barang
Rp.20.793.974.001-*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.20.793.974.001.-** dan **Rp. Rp.16.869.505.947** Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 mengalami penurunan dari Realisasi Belanja Barang TA 2023.

Perbandingan Belanja Barang Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	9.226.002.400	8.113.176.240	-
Belanja Barang Non Operasional	3.075.724.523	2.623.030.352	-
Belanja Jasa	2.170.913.107	2.752.772.564	-
Belanja Pemeliharaan	4.188.863.462	1.922.339.104	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.571.242.384	843.003.492	-
Belanja Perjalanan Luar Kota		57.244.999	-
Belanja Barang Persediaan	561.228.125	557.939.196	-
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.			-
Jumlah Belanja Kotor	20.793.974.001	16.869.505.947	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	20.793.974.001	16.869.505.947	-

Belanja Modal
Rp.168.214.460-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp. 168.214.460-**. Dan **Rp. Rp. 74.910.000-**. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Turunnya realisasi Belanja Modal Tahun 2023 karena ada pengurangan pada pagu anggaran dan refockusing anggaran.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.214.460	74.910.000	95,90
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	168.214.460	74.910.000	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	168.214.460	74.910.000	95.90

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin Rp.0,00.

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.0,00** dan **Rp. 0,00-**.

Berdasarkan table di bawah ini, belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2023 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan mesin	0	0	0,00
Pengembangan Nilai	0	0	0,00
Penyelesaian Pembangunan (KJA)	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp.0,00

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan tahun 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,00-** dan **Rp. 0,00-**.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	1,32
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	1,32

Belanja Modal
Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Rp.0,00

B.5.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.0,00,-** dan **Rp. 0,00** Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 adalah **Rp. 0,00** tidak ada perbandingan belanja modal jalan, irigasi, jaringan Tahun 2023 dan Tahun 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN JENIS BELANJA	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Belanja Modal
Lainnya Rp. 0

B.5.4 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal lainnya Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0, dan Rp.0,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
Pemasangan Pipa Intake	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp. 0,-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.0** dan **Rp.0** yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 dan Tahun 2022

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
PT. Bank BRI (Persero) Tbk.Singaraja	-	-
Uang Tunai/di Brangkas	-	-
Uang Muka UP	-	-
Kwintansi UP yang belum di SPJkan	-	-
Bendahara Pembantu	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp.0.00,-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebesar masing-masing **Rp.0,00-** dan **Rp.0**. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Jumlah		

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp.0.000-.

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing sebesar **Rp.0.00.** dan **Rp.600.000-.** Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Tahun 2023 dan Tahun 2022

Jenis	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas Lainnya dibendahara pengeluaran	-	0
Kas lainnya dibendahara penerimaan	-	600.000
Kas lainnya dari Hibah yang Belum Disahkan	-	0
Jumlah Kas Lainnya setara kas	-	600.000

Persediaan
Rp.215.826.250-.-.

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp. 215.826.250-.** dan **Rp. 64.428.000-.** Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Jenis	Tahun 2023	Tahun 2022
Barang Konsumsi	43.443.250	15.178.000
Barang Utuk Pemeliharaan		
Persediaan Lainnya	172.383.000	49.250.000
Jumlah	215.826.250	64.428.000

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah
Rp.84,205,734,000

C.5 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki oleh Kantor Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 84,205,734,000** dan **Rp.84.205.734.000,00-.**

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	84.205.734.000
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2023	84.205.734.000

ada mutasi/perubahan tanah pada Satuan Kerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan dikarenakan adanya Revaluasi /Penilaian Kembali Aset Oleh tim penertiban aset dari Kantor Pelayan Kas Negara dan Lelang Singaraja Pengembangan Budidaya Laut.

Rincian saldo Tanah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahun 2023

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	19,800 M2	Tukadpule Sanggalangit Kec. Gerokgak Bll	12.073.320.000
2	67,000 M2	Desa Penyabangan Grokgak Kab. Bll	36.448.000.000
3	146,000 M2	Tambak Desa. Pejarakan Gerokgak Kab,Bll	35.684.414.000
Jumlah			84.205.734.000

Peralatan dan
Mesin
Rp.34.849.640.646-

C.6 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap Satuan Kerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan berupa Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan Tahun 2023 adalah **Rp.34.849.640.646-.** dan **Rp.34.904.145.186-.** Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2022	32.828.665.186
Mutasi Tambah	243.644.460
Pembelian	
Hibah Barang	
Mutasi Kurang	298.149.000
Penghentian Penggunaan	
Saldo Per 31 Desember 2023	34.849.640.646
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Desember 2023	- 33.595.612.317
Nilai Buku per 31 Desember 2022	1.254.028.329

*Gedung dan
Bangunan
Rp 24.650.901.610-
..*

C.7 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah **Rp. 24.650.901.610-** dan **Rp. 20.070.88.403-**. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	27.589.782.922
Mutasi tambah:	6.714.426.805
-	-
Mutasi kurang:	2.134.406.598
-	-
-	-
Saldo per 31 Desember 2023	24.650.901.610
Akumulasi Penyusutan s.d.30 Desember 2023	(12.668.979.038)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	11.981.922.572

*Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp.4.490.267.976.-*

C.8 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.4.490.267.976** dan **Rp.4.196.197.975** Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	3.902.127.974
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2023	4.490.267.976
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	4.490.267.976

Tidak ada mutasi/perubahan jalan, irigasi, dan jaringan pada Satuan Kerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan.

*Aset Tetap Lainnya
Rp.738.465.890*

C.9 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah **Rp.738.465.890** dan **Rp.738.465.890** Mutasi Aset tetap lainnya untuk Tahun 2023, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	738.465.890
Mutasi tambah:	0
-	0
-	
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2023	738.465.890
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	
Nilai Buku per 31 Desember 2023	738.465.890

Rincian aset tetap lainnya berupa monografi, buku lainnya, laporan dan cat dinding.

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp.
0,00*

C.10 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.0,00-** dan **Rp. 0,00-**. nilai tersebut adalah pembayaran perencanaan pembangunan gedung pelayanan public pada Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Gondol

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp.47.869.854.624)*

C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing **(Rp.47.869.854.624)** dan **(Rp.40.723.044.796)** Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
31 Desember 2023*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi dan Amortisasi	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	34.849.640.646	33.369.426.329	1.480.214.317
2	Gedung dan Bangunan	24.650.901.610	12.200.090.044	12.450.811.566
3	Jalan dan Jembatan	469.749.000	469.749.000	-
4	Irigasi	556.402.000	237.515.274	318.886.726
5	Jaringan	3.464.116.976	1.593.073.977	1.871.042.999
6	Aset Tetap Lainnya	738.465.890		738.465.890
7	Aset yang tidak digunakan			-
Akumulasi Penyusutan		64.729.276.122	47.869.854.624	16.859.421.498

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak Berwujud
Rp.3.221.989.165*

C.12 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah **Rp. 3.221.989.165-** dan **Rp. 3.221.989.165,00-**.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan berupa paten, software, dan hasil kajian/penelitian. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	3.221.989.165
Mutasi Tambah	
Pembelian	
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2023	3.221.989.165
Akumulasi Amortisasi s.d 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	3.221.989.165

Tidak ada mutasi/perubahan asset tak berwujud pada Satuan Kerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan.

Rincian Aset Tak Berwujud Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud Tahun 2023

Uraian	Nilai
Paten	3.132.114.765
Hasil Kajian/Penelitian	0
Software	89.874.400
Jumlah	3.221.989.165

Daftar hasil kajian/penelitian dan paten adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun Perolehn	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Sima Pro 7.1 Prof.Analyst S.U/2009	25/01/2011	89.874.400	Software Komputer
2	Wahana Pemicu Pemijahan Abalon	26/07/2012	222.663.200	Hak Paten Sederhana
3	Alat Untuk Meningkatkan Produksi Kepiting Bakau	27/10/2017	98.530.000	Hak Paten Sederhana
4	Vaksin Vibrio Polivalen	30/01/2012	216.786.500	Paten Biasa
5	Metode Meningkatkan Produktivitas	06/11/2013	90.413.800	Paten Biasa
6	Vaksin Protein Rekombinan	25/04/2013	196.006.500	Paten Biasa
7	Metode Alat Pembesaran Abalon	12/12/2013	287.978.900	Paten Biasa
8	Metode Meningkatkan Produksi Bandeng	25/11/2013	90.413.800	Paten Biasa
9	Probiotik produksi benih udang	25/11/2013	277.157.075	Paten Biasa
10	Vaksin flexibacter mencegah penyakit	13/02/2014	379.450.700	Paten Biasa
11	Rekombinan Protein Kapsid Megalocytivirus	19/01/2016	279.356.929	Paten Biasa
12	Probiotik Berbahan Dasar Bakteri untuk pertumbuhan	31/08/2017	288.870.647	Paten Biasa
13	Formulasi Pakan Buatan Berbasis Rumput Laut untuk	17/10/2017	243.805.886	Paten Biasa
14	Formulasi Pakan Berbentuk Lempeng (Flake)	17/10/2017	223.694.160	Paten Biasa
15	Metode Pendederan Teripang	17/10/2017	236.986.668	Paten Biasa
			3.221.989.165	

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp2.106.039.543
)-.

C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing **(Rp.1.480.044.483)-**. Dan **(Rp.1.480.044.483)-**. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset tak Berwujud			
Paten	3.132.144.765	1.465.367.503	1.465.367.503
Software	89.874.400	89.874.400	-
hasil Kajian Peneliti			
Jumlah	3.222.019.165	1.555.241.903	
Aset yang tidak digunakan	-	550.797.840	
Jumlah	3.222.019.165	2.106.039.743	1.465.367.503

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari
KPPN
Rp. 0

C.14 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing sebesar **Rp. 0** dan **Rp 0**. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp.0.000-.

C.15 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga Tahun 2023 dan Tahun 2022 berupa setoran pendapatan dari kegiatan percontohan masing-masing sebesar **Rp. 0.000-** dan **Rp. 600.000-**. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

*Perbandingan Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Pembayaran Tgihan Listrik Bulan Desember		-
Pembayaran Tagihan Air Bulan Desember		-
Pembayaran Tagihan Telpon Bulan Desember		-
Setoran pendapatan dari kegiatan percontohan	-	600.000
Jumlah	-	600.000

Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp.0,00-.

C.16 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar **Rp.0,00-** dan **Rp.0,00-**. merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya beban tersebut adalah beban belanja pegawai yang harus dibayar dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
		-
Jumlah		-

Ekuitas

Rp.

103.459.649.370

C.17 Ekuitas

Ekuitas Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing senilai **Rp.103.459.649.370-.** dan **Rp.97.734.685.936-.** Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp.559.032.322.

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebesar **Rp.559.032.322.** dan **Rp.429.389.200.** Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut terdiri dari :

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Tahun 2023 dan Tahun 2022*

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian,Perkebunan peternakan	475.664.600	8.749.600	
Pendapatan penjualan peralatan dan mesin		-	
Pendapatan Sewa tanah gedung dan bangunan	83.367.722	171.959.600	
Pendapatan penggunaan sarana dan tuisi	-	7.200.000	
Penelitian /riset,survey,pemetaan dan iptek		4.500.000	
pendapatan pengujian sertifikasi,kalibrasi	-	236.760.000	
Pendapatan jasa lembaga keuangan giro		-	
Penutupan rekening			
Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan	-	220.000	
Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	-	-	
Pendapatan dari penggunaan sarana dan prasarana tuisi	-	-	
Pendapatan pemindahatanganan BMN	-		
penerimaan kembali belanja barang TAYL		-	
JUMLAH	559.032.322	429.389.200	-

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari hasil penjualan peternakan dan perikanan, sewa gedung dan bangunan, jasagiro, serta jasa tenaga pekerjaan. Sedangkan Pendapatan Lain-Lain-LO merupakan pengembalian belanja pegawai tahun anggaran yang lalu dan pengembalian belanja modal TAYL yang berasal dari transaksi pada tahun 2019.

Beban Pegawai
Rp.51.869.714.300

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.51.869.714.300-.** dan **Rp.59.604.647.661-.** Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang

maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (TURUN) 100%
Beban Gaji	26.204.625.227	31.388.140.611	0
Beban Gaji dan Tunjangan kinerja	25.578.261.073	28.141.814.050	0
Beban Honorarium	0	0	0
Beban Lembur	86.828.000	74.693.000	0
Beban Vakasi	-	-	0
Jumlah Belanja Kotor	51.869.714.300	59.604.647.661	0
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	0	0
JUMLAH BEBAN PEGAWI	51.869.714.300	59.604.647.661	0

*Beban Persediaan
Rp.603.381.825-.*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.603.381.825-.** dan **Rp.537.136.196-.** Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	561.228.125	395.151.400	-
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	-	-
Beban Persediaan suku cadang	-	-	-
Beban Persediaan Bahan Baku	39.238.000	141.984.796	-
Beban Persediaan Lainnya	2.415.700	-	-
JUMLAH BEBAN PERSEDIAAN	602.881.825	537.136.196	-

Beban Barang
dan Jasa
Rp.18.003.674.98
0-..

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Jasa Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.18.003.674.980-** dan **Rp.13.275.714.104-**. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan asset tetap. Kenaikan beban barang dan jasa karena adanya penambahan kegiatan riset serta kegiatan non operasional lainnya berupa kegiatan riset diluar kantor.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	1.843.415.790	1.265.391.542	0,00
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	63.360.000	164.102.000	0,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	41.199.920	7.780.440	0,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	195.816.000	203.562.000	0,00
Beban barang opr.penanganan COVID-19		21.600.000	
Beban Barang Operasional Lainnya	568.112.000		
Beban Bahan	421.968.321	218.915.206	0,00
Beban Honor Output Kegiatan	5.794.132.319	6.018.560.000	0,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	3.075.724.523	2.623.030.352	0,00
Belanja Barang konsumsi			
Beban Peralatan dan esin Ekstrakompabel	19.536.000		
Beban Gedung dan Bangunan Ekstrakompable	99.000.000		
Ekstrakompable	10.000.000		
Beban Langganan Listrik	963.736.000	2.094.490.365	0,00
Beban Langganan Telepon	9.123.633	6.737.138	0,00
Beban Langganan Air	24.477.000	237.099.870	0,00
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	240.000.000	240.000.000	0,00
Beban Sewa	476.410.000	100.804.200	0,00
Beban Jasa Profesi	46.000.000	19.800.000	0,00
Beban Jasa Lainnya	4.111.663.474	49.841.000	0,00
Beban Jasa penanganan COVID-19		4.000.000	
JUMLAH	18.003.674.980	13.275.714.113	0,00

Beban
Pemeliharaan
Rp.4.192.559.462

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.4.192.559.462-** dan **Rp.1.939.292.095-**. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan disebabkan oleh adanya penambahan pemeliharaan bebarapa item barang-barang inventaris terutama dalam bentuk peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk periode Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.901.780.689	745.226.850	0,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan penanganan COVID-19	0		
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.287.082.773	1.177.112.245	0,00
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	2.250.000	7.981.000	0,00
Beban Persediaan Suku Cadang	1.446.000	8.972.000	0,00
Beban persediaan bahan baku			
Beban persediaan lainnya			
Beban Penyesuaian persediaan			0,00
JUMLAH	4.192.559.462	1.939.292.095	0,00

Beban Perjalanan
Dinas
Rp.1.571.242.384
-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.1.571.242.384-** dan **Rp.890.248.491-**. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan Beban Perjalanan Dinas karena adanya penghematan anggaran dan perubahan nomenklatur.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK TURUN(%)
Beban Perjalanan biasa	1.452.747.384	788.103.492	
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	108.950.000	54.900.000	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meting Dalam Kota	9.545.000	47.244.999	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meting Luar Kota		40.560.000	
JUMLAH	1.571.242.384	930.808.491	

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp.0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.0** dan **Rp.0**. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Tahun 2023 dan Tahun 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0		
Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	
JUMLAH	0	0	

Beban

Penyusutan dan

Amortisasi

Rp.2.2.3.317.535.

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.2.203.317.535.** dan **Rp.2.862.258.226..** Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	926.976.765	1.550.569.070	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	937.777.989	736.309.366	-
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan		-	
Beban Penyusutan Irigasi	18.270.406	1.589.436	-
Beban Penyusutan Jaringan	121.143.215	118.476.548	-
Jumlah Penyusutan		2.406.944.420	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	150.394.840	161.528.000	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	48.754.320	-	-
Jumlah Amortisasi		161.528.000	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.203.317.535	2.568.472.420	-

Beban Penyisihan

Piutang Tak

TertagihRp.0

D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,-.

Beban Lain-lain

Rp.0

D.10 Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp,0 dan Rp.0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan Non
Operasional
200.644.478

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsientitas. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional per Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 20212	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	-	
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	-	
Penerimaan kembali belaja barang YAYL	-		
Pendapatan pelepasan aset non lancar	164.569.998	9.301.728	
Beban kegiatan non operasional lainnya	36.074.480	0	-
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	200.644.478	9.301.728	-

**)Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Aku nini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

Pos Luar Biasa
Rp.0

D.12 Pos Luar Biasa

PosLuar Biasa Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,-dan Rp. 0,-.

Pos Luar biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Balai Besar Riset

Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

1.1. Kondisi umum

Berdasarkan SK. Menteri Kelautan dan Perikanan No.22/PERMEN-KP/2017 tertanggal 27 Maret Tahun 2017 di Jakarta tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP), yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Eselon I BRSDM dan dibina secara teknis oleh Pusat Riset Perikanan (Puriskan).

BBRBLPP telah berhasil mengembangkan teknologi perbenihan beberapa spesies ikan laut, krustase dan kekerangan bahkan pembenihan ikan bandeng dan kerapu telah berkembang ditingkat petani dengan prototype hatcheri skala rumah tangga (HSRT). Dewasa ini tidak kurang dari 6,700 bak hatcheri di Kabupaten Buleleng secara fleksibel dan aktif melakukan kegiatan produksi benih bandeng maupun kerapu bebek dan kerapu macan. Keberhasilan ini telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Namun demikian, masih teridentifikasi berbagai masalah teknis yang menghambat perkembangan budidaya laut antara lain mutu induk, telur, benih, penyakit, pakan dan teknologi budidaya pembesaran. Oleh karena itu, penelitian yang berkaitan dengan permasalahan tersebut perlu lebih diintensifkan.

Selain penelitian untuk mengatasi berbagai kekurangan pada berbagai aspek budidaya, penelitian terapan dalam rangka pengembangan kawasan budidaya laut perlu mendapat porsi yang lebih besar. Hal ini perlu dilakukan agar penelitian skala laboratorium dapat diterapkan pada skala usaha sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pembudidaya. Sekitar 30 jenis ikan dan non-ikan yang telah dan sedang diteliti di BBRBLPP pada tahun 1984-2009 namun teknologi perbenihan secara utuh dengan penerbitan petunjuk teknis

baru dilakukan pada 12 jenis yaitu udang windu (*Penaeus monodon*), Udang vannamei (*Litopenaeus vannamei*), bandeng (*Chanos chanos*), kerapu bebek (*Cromileptis altivelis*), kerapu sunu (*Plectropomus leopardus*), Kerapu raja sunu (*Plectropoma laevis*), kerapu macan (*Ephinephelus fuscoguttatus*), kerapu batik (*E. microdon*), kerapu lumpur (*E. coioides*), kakap merah (*Lutjanus argentimaculatus*), kepiting bakau (*Scylla paramamosain*), rajungan (*Portunus pelagicus*), dan teripang (*Holothurea scabra*).

Tugas pokok BBRBLPP adalah melaksanakan riset strategis dalam bidang budidaya laut meliputi: perbenihan dan genetika populasi, nutrisi dan teknologi pakan, kesehatan ikan, lingkungan dan toksikologi, teknologi budidaya dan penyuluhan perikanan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BBRBLPP dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar dan dibantu oleh Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional. Secara struktural Bagian dan Subbagian pada BBRBLPP adalah sebagai berikut.

1.1.1 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya, BBRBLPP dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Balai dibantu oleh Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang membawahi subbagian/seksi sebagai berikut:

A. Bagian Tata Usaha

- Bagian Tata Usaha Mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga
- Menyelenggarakan fungsi : pelaksanaan urusan kepegawaian, administrasi jabatan fungsional dan tata laksana, Pelaksanaan urusan keuangan, persuratan, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

(A.1). Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian, dengan tugas melakukan urusan kepegawaian administrasi jabatan fungsional dan tata laksana.

(A.2). Sub Bagian Keuangan dan Umum Subbagian Keuangan dan Umum dengan tugas melakukan urusan keuangan persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan

B. Bidang Tata Operasional

- Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran pengumpulan data, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.
- Menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana program dan anggaran pengumpulan data, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan pelaporan.

(B.1). Seksi Program dan Anggaran

Seksi Program dan Anggaran, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran.

(B.2). Seksi Monitoring dan Evaluasi

Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pengumpulan data, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan.

C. Bidang Pelayanan Teknis, Sarana dan Penyuluhan

- Bidang Pelayanan Teknis dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan persiapan kerjasama, pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, publikasi serta pengelolaan prasarana dan sarana penelitian dan pengembangan budidaya laut.
- Menyelenggarakan fungsi persiapan kerjasama, pelayanan teknis, jasa diseminasi, informasi, komunikasi, publikasi hasil penelitian dan pengembangan budidaya laut serta pengelolaan perpustakaan.
- Pengelolaan prasarana dan sarana riset budidaya laut

(C.1) Seksi Kerjasama dan Pelayanan Riset

Seksi kerjasama dan pelayanan Riset, informasi, komunikasi publikasi hasil riset dan pengembangan budidaya laut, serta pengelolaan.

(C.2). Seksi Prasarana dan Sarana

Seksi Prasarana dan sarana mempunyai tugas melakukan pengelolaan prasarana dan sarana penelitian dan pengembangan budidaya laut.

(C.3) Seksi Penyuluhan

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengelolaan berkaitan dengan tugas dan fungsi para penyuluh perikanan di lapangan.

D. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Peneliti, Teknisi Litkayasa, Pustakawan, Arsiparis dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk pelaksanaan kegiatan penelitian, pada tingkat BBRBLPP dibentuk empat kelompok peneliti yaitu kelompok genetika, breeding dan bioteknologi, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi budidaya serta kesehatan ikan. Selain tenaga fungsional peneliti, jabatan fungsional non peneliti yaitu jabatan fungsional teknisi litkayasa, pustakawan, arsiparis, dan pranata komputer.

STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN, GONDOL – BALI



Gambar 1. Struktur Organisasi BBRBLPP

1.1.2. Sumber Daya Penelitian dan Pengembangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BBRBLPP ditunjang oleh sumber daya manusia, sumber daya fisik, dan sumber daya keuangan. Sumber daya manusia terdiri atas tenaga fungsional peneliti, penyuluh maupun tenaga fungsional lainnya dan tenaga administrasi. Sumber daya fisik berupa aset Balai yang meliputi tanah, bangunan kantor, guest house, prosesing, hatchery, kolam percobaan, laboratorium, ruang pertemuan, dan perpustakaan. Sumber daya keuangan dalam pengelolaan riset, penyuluhan, dan pengembangan perikanan budidaya laut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, pendanaan penelitian dapat berasal dari kegiatan kerjasama riset dengan institusi dalam negeri maupun luar negeri.

Bertitik tolak dari Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang klasifikasi potensi sumberdaya perikanan secara umum dibedakan menjadi sumber daya terbarukan (renewable resources) dan tidak terbarukan (non-renewable resources). Sumberdaya terbarukan meliputi perikanan (perikanan tangkap dan budidaya), mangrove, terumbu karang, padang lamun, mineral air laut dan air laut dalam, energi gelombang, pasang surut, angin dan OTEC (ocean thermal energy conversion). Sumber daya tidak terbarukan (non-renewable resources) meliputi minyak dan gas bumi serta berbagai jenis mineral yang terkandung didalamnya.

Potensi pengembangan budidaya perikanan laut memiliki prospek yang sangat tinggi untuk dikembangkan. Hal ini didukung oleh kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan serta memiliki sumberdaya berbagai spesies ikan ekonomis penting. Komoditas potensial budidaya laut yang mempunyai daya saing tinggi antara lain ikan tuna sirip kuning, kakap putih, kerapu sunu, abalone, teripang, dan lobster untuk dikembangkan sangat menjanjikan. Oleh karena itu, penelitian mengenai berbagai aspek budidaya beberapa komoditas tersebut perlu dilakukan secara ilmiah.

Peningkatan produksi perikanan dapat dicapai melalui inovasi teknologi yang efektif dan efisien, berdaya saing tinggi serta berkelanjutan. Berbagai komponen dan paket teknologi perikanan telah banyak dihasilkan oleh BBRBLPP yang dihasilkan ini harus segera secara intensif dikomunikasikan kepada pengguna agar dapat diimplementasikan dalam usaha yang riil sebagai upaya peningkatan efisiensinya. Aplikasi teknologi yang lebih inovatif akan menjadikan sektor perikanan menjadi ladang usaha yang lebih menarik bagi masyarakat untuk dijadikan sumber penghasilan yang menguntungkan.

Prospek pengembangan perikanan sebagai unit usaha sangat terbuka lebar mengingat melimpahnya sumber daya ikan yang dapat dijadikan sebagai bahan atau modal awal usaha tersebut serta tersedianya paket teknologi perikanan yang tepat guna. Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan telah menghasilkan paket teknologi pembenihan seperti kepiting, rajungan, ikan kobis, kakap merah, ikan kuing dan udang windu. Sedangkan terdapat komoditas yang masih digunakan dalam kegiatan riset di tahun 2019 diantaranya adalah tuna sirip kuning, lobster laut, ikan kerapu sunu, kakap putih, teripang dan abalone. Potensi SDM Penyuluhan yang tersebar di 4 Provinsi yaitu Bali, NTB, NTT dan Kalimantan tengah menjadi ujung tombak pengembangan teknologi yang dihasilkan oleh BBRBLPP.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.2. Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program riset Perikanan untuk mendukung pembangunan KP adalah belum tersedianya kerangka regulasi yang mengikat untuk pemanfaatan hasil riset oleh ditjen teknis sebagai landasan penyusunan kebijakan, sehingga peran BRSDM sebagai *Inhouse Consultant* lebih optimal, belum tersedia. Disini lain menurunnya fokus riset untuk upaya antisipatif dari BBRBLPP untuk menjawab permasalahan yang dihadapi perikanan budidaya laut saat ini antara lain; penurunan kualitas benih, merebaknya berbagai macam penyakit yang terdapat pada ikan laut dan udang, ketersediaan benih dan induk unggul yang belum memadai, pakan yang tidak efektif

dan mahal, penurunan kualitas lingkungan serta perubahan iklim global yang mempengaruhi tingkat produktivitas dan keberlanjutan perikanan laut.

Strategi untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut di atas adalah melalui penelitian yang bersifat dasar, terapan maupun pengembangan untuk menemukan teknologi tepat guna dalam perbenihan dan pembesaran ikan laut serta pengembangan kapasitas SDM yang kompeten.

Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan merupakan acuan bagi pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi perikanan budidaya laut serta sintesis kebijakannya. Dengan demikian, teknologi dan kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan dalam mengantisipasi berbagai dampak dari pengaruh eraglobalisasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II.

VISI-MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Dalam upaya pencapaian target pembangunan yang telah diprogramkan oleh Kementerian Kelautan dan perikanan tersebut, BBRBLPP sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Pusat Riset, Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, membuat program kerja dan arah kebijakan yang dituangkan dalam visi, misi, serta sasaran strategis yang mendukung pada arah kebijakan Pusat Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yaitu:

2.1. VISI

Dalam upaya pencapaian target pembangunan yang telah diprogramkan oleh Kementerian Kelautan dan perikanan BBRBLPP sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Pusat Riset Perikanan dan Pusat pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan, membuat program kerja dan arah kebijakan yang dituangkan dalam visi, misi, serta sasaran strategis yang mendukung pada arah kebijakan Pusat Riset Perikanan, Pusat pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan serta BRSDM KP.

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan

Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur.

Visi Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Visi BRSDM pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Visi Puslatluh KP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP dan visi BRSDM yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Visi dari BBRBLPP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong..

2.2. MISI

Misi BBRBLPP adalah menjalankan misi Presiden, KKP dan BRSDM dalam bidang kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden, KKP mendukung 4 (empat) misi yaitu :

1. Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan

2. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
 3. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
 4. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.
- Ketiga misi di atas dilakukan secara bertanggung jawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

2.3. Tujuan

Tujuan yang diharapkan adalah penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi BBRBLPP dalam rangka mencapai sasaran strategis pembangunan sektor perikanan 2020 – 2024 adalah :

- Meningkatkan kompetensi SDM riset dan penyuluhan perikanan guna meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk perikanan secara optimal.
- Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.
- Meningkatkan kapasitas dan kemandirian kelompok pelaku utama/usaha Kelautan dan Perikanan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup melalui kegiatan penyuluhan
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan.

1.4. Sasaran Strategis

Tujuan yang diharapkan adalah penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi BBRBLPP dalam rangka mencapai sasaran strategis pembangunan sektor perikanan 2020 – 2024 adalah :

Meningkatkan kompetensi SDM riset dan penyuluhan perikanan guna meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk perikanan secara optimal.

Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing

Meningkatkan kapasitas dan kemandirian kelompok pelaku utama/usaha Kelautan dan Perikanan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup melalui kegiatan penyuluhan

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan.

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN PERIKANAN

Fokus RPJMN periode IV (2020-2024) dalam siklus RPJPN 2005-2025 adalah untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan tersebut diprioritaskan untuk memperkuat struktur perekonomian berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas serta berdaya saing. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Agenda Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan.
3. Agenda Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Agenda Membangun Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Agenda Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar.
6. Agenda Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

7. Agenda Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam rangka melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional (Prioritas Nasional) RPJMN 2020-2024, telah disusun Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Major Project di KKP yaitu Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng, dan Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional. Selain itu KKP juga mendukung mayor project lainnya antara lain terkait dengan pariwisata dan Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.

Agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah arahan pembangunan nasional yang mempunyai visi “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Agenda pembangunan Nasional ini harus diimplementasikan oleh kementerian yang ada sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dua diantaranya mempunyai kaitan langsung yang penting dengan Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan. Pertama adalah tentang meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Sedangkan yang kedua adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, agenda nasional tersebut telah dilengkapi dengan program “quick wins” yaitu program yang diharapkan dapat menjadikan pendongkrak keberhasilan dalam mewujudkan visi pembangunan nasional. Isu dan fokus kegiatan riset pada Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan didasarkan pada penetapan isu kegiatan BRSDM KP. Adapun isu kegiatan BRSDM KP didasarkan pada arah kebijakan nasional dengan mempertimbangkan agenda riset nasional, Rencana Kerja Pemerintah, issue KP baik regional dan internasional serta kebutuhan eselon I lingkup KKP.

Strategi Agenda Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas KKP antara lain adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, yang meliputi Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, memperkuat komitmen pelaksanaan target SDG 14 Ekosistem Lautan (Life Below Water), dan Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan strategi penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi pertanian dan perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);
3. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan strategi konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati di daratan maupun pesisir, perlindungan kerentanan pesisir dan sektor kelautan, dan pengembangan rendah karbon pesisir dan laut.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BBRBLPP)

Arah dan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, adalah sebagai berikut :

Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan. Arah kebijakan ini menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan Kontribusi Ekonomi sektor KP (DJPT)

Mengoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses permodalan, dan perlindungan usaha budidaya.

Arah kebijakan menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan kontribusi ekonomi sektor KP (DJPB)

Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk, penguatan sistem karantina ikan, peningkatan nilai tambah untuk peningkatan devisa. Arah kebijakan menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan kontribusi ekonomi sektor KP. (DJPDS, BKIPM).

Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait Arah kebijakan menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (PRL, PSDKP dan BKIPM).

Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:

Penguatan kegiatan riset yang dimanfaatkan oleh masyarakat, inovasi teknologi dan riset kemaritiman, kelautan dan perikanan, serta peningkatan database kelautan dan perikanan.

Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil Riset, diseminasi teknologi perikanan dan kelautan yang berkelanjutan dan produktif, Pengembangan/pembentukan pusat unggulan riset kelautan dan perikanan;

Pengembangan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, termasuk yang berbasis digital;

Pengembangan kewirausahaan perikanan, pengembangan angkatan kerja perikanan generasi milenial, peningkatan daya saing SDM kelautan dan perikanan melalui diklat agar dapat terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri serta membentuk startup (usaha rintisan), penguatan literasi maritim,

Pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan yang bersertifikasi kompetensi

Pembentukan kelompok kelautan dan perikanan mandiri Penguatan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan

Peningkatan sarana dan prasarana riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan; Peningkatan UPT riset, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020 – 2024 adalah:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
2. Gender
3. Modal Sosial Budaya;
4. Transformasi Digital

Pengarusutamaan dalam Renstra 2020-2024 KKP mengacu pada Dokumen RPJMN 2020-2024 yang telah menetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pembangunan inovatif adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan.

Keempat mainstreaming ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif.

Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan

3.2.1 ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2020-2024

Arah kebijakan BRSDM KP 2020-2024 mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan nasional (RPJMN) dan arah kebijakan pembangunan KP yang ada. Berdasarkan penjabaran strategi pembangunan KP 2020 – 2024, strategi penguatan daya saing SDM, inovasi teknologi dan riset merupakan prioritas utama BRSDM KP yang diperoleh dari hasil analisis SWOT. Upaya yang akan dilaksanakan untuk memenuhi hal tersebut diantaranya adalah:

1. Menyelenggarakan riset untuk menyelesaikan isu dan permasalahan.
2. Meningkatkan peran riset serta inovasi teknologi dalam mendukung percepatan pembangunan kelautan dan perikanan.
3. Meningkatkan diseminasi hasil riset sesuai dengan upaya pengembangan industri kelautan dan perikanan.

4. Membangun hubungan melalui jaringan kemitraan dalam kerangka kerjasama riset dan industri.
5. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi dan pelatihan sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
6. Meningkatkan kompetensi ASN KP yang unggul dan berdaya saing global.
7. Membangun sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan berbasis digital.
8. Membangun sistem penyuluhan yang bersinergi dengan riset dan pengembangan SDM.
9. Memperkuat kelembagaan dan manajerial riset dan SDM

BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja KKP Tahun 2020 – 2024

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		T A H U N			
		2020	2021	2022	2023
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE					
SS 1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP					
1	Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP	59,16	60,31	61,47	62,66
CUSTOMERS PERSPECTIVE					
SS 2. Ekonomi sektor KP yang meningkat					
2	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7,9	8,11	8,31	8,51
3	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	6,17	6,43	6,86	7,27
4	Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	56,39	58,08	59,53	61,02
SS 3. Sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan					
5	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	≤53,7	≤80	≤80	≤80
6	Luas Kawasan konservasi (juta Ha)	23,4	24,1	25,1	26

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
SS 4. Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat						
7	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri	17.175	17.696	18.296	18.916	19.546
SS 5. Hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan						
8	Jumlah hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan (paket)	5	10	10	10	15
SS 6. Tatakelola SDKP yang bertanggung jawab						
9	WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola	3	5	7	11	11
10	Jumlah penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir	24				102
SS 7. Industrialisasi KP yang berdaya saing						
11	Produksi perikanan (juta ton)	26,46	27,86	29,39	30,98	32,72
12	Produksi garam rakyat (juta ton)	3	3,1	3,2	3,3	3,4
SS 8. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif						
16	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i>	54,18	60	65	70	75
17	Persentase Kepatuhan (<i>Compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	89	90	91	92	93
18	Indeks efektifitas operasi armada pengawasan SDKP	7,85	7,95	8,05	8,15	8,25
19	Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%)	77	79	81	82	82
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE						
SS 9. Tatakelola pemerintahan yang baik						
20	Indeks profesionalisme ASN (indek)	72	73	74	75	76
21	Indeks SPBE	70	71	72	73	74
22	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KKP	85	85	85	85	85
23	Level maturitas SPIP	3	3	3	3	3
24	Nilai kinerja anggaran KKP	Baik (80-90)	Baik (80-90)	Baik (80-90)	Sangat Baik (>90)	Sangat Baik (>90)
25	Predikat Sakip KKP	A	A	A	A	A
26	Opini atas Laporan Keuangan KKP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Paparan Rancangan Teknokratik Renstra KKP Tahun 2020 - 2024

4.2 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan BBRBLPP Tahun 2020-2024

Renstra ini merupakan penjabaran operasional dari Pusat Riset perikanan (Puriskan) dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (Puslatluh) yang membutuhkan percepatan dalam pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk dapat mewujudkan sasaran kegiatan, BBRBLPP menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BBRBLPP TA 2020 - 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				2020	2021	2022	2023	2024
SS1	Terlaksananya pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	IKU 1	Jumlah Kelompok Pelaku Utama/ Usaha yang disuluh (kelompok)	4.609	4.609	4.809	4.909	5.009
		IKU 2	Jumlah kelompok yang dinilai kelas kelompoknya di Satminkal BBRBLPP (kelompok)	200	200	200	200	200
		IKU 3	Calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi kelompok pelaku utama perikanan di Satminkal BBRBLPP (kelompok)	210	210	210	210	210
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				2020	2021	2022	2023	2024
SS3	Hasil riset dan inovasi BBRBLPP yang dimanfaatkan	IKU 4	Jumlah Teknologi Hasil Riset KP yang dihasilkan	6	3	6	6	6
		IKU 5	Jumlah Produk Biologi yang	2	-	-	-	-

			dihasilkan					
		IKU 6	Jumlah Lembaga Riset Perikanan yang terstandar	1	1	1	1	1
		IKU 7	Jumlah sarana dan prasarana BBRBLPP yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	1	1	1	1	1
		IKU 8	Jumlah jejaring dan/atau kerjasama BBRBLPP yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	4	3	4	4	4
		IKU 9	Jumlah Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang dipublikasikan (Buah)	18	20	20	20	20
SS3	Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat	IKU 10	Tersedianya Metode Percontohan Penyuluhan KP (lokasi)	1	1	4	5	6
		IKU 11	Pembinaan Usaha Kecil Mikro dan Koperasi sektor KP	648	-	648	648	648
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE				2020	2021	2022	2023	2024
SS4	Tata kelola pemerintahan BBRBLPP yang baik	IKU 12	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BBRBLPP (indeks)	72	73	72	72	72
		IKU 13	Persentase unit kerja BBRBL-PP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	82	84	82	82	82

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan yang merupakan entitas pelaporan dari Satuan Kerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Balai Besar Penelitian Budidaya Laut adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset

Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan	

	Piutang Negara/DJKN	
--	---------------------	--

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset
Tetap*

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan

penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan

disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset

Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikuangi akumulai penyusutan.

Kewajiban

- **Kewajiban**

- Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp.559.032.322.

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebesar **Rp.559.032.322.** dan **Rp.429.389.200.** Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut terdiri dari :

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Tahun 2023 dan Tahun 2022*

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian,Perkebunan peternakan	475.664.600	8.749.600	
Pendapatan penjualan peralatan dan mesin		-	
Pendapatan Sewa tanah gedung dan bangunan	83.367.722	171.959.600	
Pendapatan penggunaan sarana dan tuisi	-	7.200.000	
Penelitian /riset,survey,pemetaan dan iptek		4.500.000	
pendapatan pengujian sertifikasi,kalibrasi	-	236.760.000	
Pendapatan jasa lembaga keuangan giro		-	
Penutupan rekening			
Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan	-	220.000	
Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	-	-	
Pendapatan dari penggunaan sarana dan prasarana tuisi	-	-	
Pendapatan pemindahatanganan BMN	-		
penerimaan kembali belanja barang TAYL		-	
JUMLAH	559.032.322	429.389.200	-

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari hasil penjualan peternakan dan perikanan, sewa gedung dan bangunan, jasagiro, serta jasa tenaga pekerjaan. Sedangkan Pendapatan Lain-Lain-LO merupakan pengembalian belanja pegawai tahun anggaran yang lalu dan pengembalian belanja modal TAYL yang berasal dari transaksi pada tahun 2019.

Beban Pegawai
Rp.51.869.714.300

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.51.869.714.300-.** dan **Rp.59.604.647.661-.** Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang

maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (TURUN) 100%
Beban Gaji	26.204.625.227	31.388.140.611	0
Beban Gaji dan Tunjangan kinerja	25.578.261.073	28.141.814.050	0
Beban Honorarium	0	0	0
Beban Lembur	86.828.000	74.693.000	0
Beban Vakasi	-	-	0
Jumlah Belanja Kotor	51.869.714.300	59.604.647.661	0
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	0	0
JUMLAH BEBAN PEGAWI	51.869.714.300	59.604.647.661	0

*Beban Persediaan
Rp.603.381.825-.*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.603.381.825-.** dan **Rp.537.136.196-.** Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	561.228.125	395.151.400	-
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	-	-
Beban Persediaan suku cadang	-	-	-
Beban Persediaan Bahan Baku	39.238.000	141.984.796	-
Beban Persediaan Lainnya	2.415.700	-	-
JUMLAH BEBAN PERSEDIAAN	602.881.825	537.136.196	-

Beban Barang
dan Jasa
Rp.18.003.674.98
0-..

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Jasa Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.18.003.674.980-** dan **Rp.13.275.714.104-**. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan asset tetap. Kenaikan beban barang dan jasa karena adanya penambahan kegiatan riset serta kegiatan non operasional lainnya berupa kegiatan riset diluar kantor.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	1.843.415.790	1.265.391.542	0,00
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	63.360.000	164.102.000	0,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	41.199.920	7.780.440	0,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	195.816.000	203.562.000	0,00
Beban barang opr.penanganan COVID-19		21.600.000	
Beban Barang Operasional Lainnya	568.112.000		
Beban Bahan	421.968.321	218.915.206	0,00
Beban Honor Output Kegiatan	5.794.132.319	6.018.560.000	0,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	3.075.724.523	2.623.030.352	0,00
Belanja Barang konsumsi			
Beban Peralatan dan esin Ekstrakompabel	19.536.000		
Beban Gedung dan Bangunan Ekstrakompable	99.000.000		
Ekstrakompable	10.000.000		
Beban Langganan Listrik	963.736.000	2.094.490.365	0,00
Beban Langganan Telepon	9.123.633	6.737.138	0,00
Beban Langganan Air	24.477.000	237.099.870	0,00
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	240.000.000	240.000.000	0,00
Beban Sewa	476.410.000	100.804.200	0,00
Beban Jasa Profesi	46.000.000	19.800.000	0,00
Beban Jasa Lainnya	4.111.663.474	49.841.000	0,00
Beban Jasa penanganan COVID-19		4.000.000	
JUMLAH	18.003.674.980	13.275.714.113	0,00

Beban
Pemeliharaan
Rp.4.192.559.462

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.4.192.559.462-** dan **Rp.1.939.292.095-**. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan disebabkan oleh adanya penambahan pemeliharaan bebarapa item barang-barang inventaris terutama dalam bentuk peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk periode Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.901.780.689	745.226.850	0,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan penanganan COVID-19	0		
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.287.082.773	1.177.112.245	0,00
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	2.250.000	7.981.000	0,00
Beban Persediaan Suku Cadang	1.446.000	8.972.000	0,00
Beban persediaan bahan baku			
Beban persediaan lainnya			
Beban Penyesuaian persediaan			0,00
JUMLAH	4.192.559.462	1.939.292.095	0,00

Beban Perjalanan
Dinas
Rp.1.571.242.384
-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.1.571.242.384-** dan **Rp.890.248.491-**. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan Beban Perjalanan Dinas karena adanya penghematan anggaran dan perubahan nomenklatur.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK TURUN(%)
Beban Perjalanan biasa	1.452.747.384	788.103.492	
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	108.950.000	54.900.000	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meting Dalam Kota	9.545.000	47.244.999	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meting Luar Kota		40.560.000	
JUMLAH	1.571.242.384	930.808.491	

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp.0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.0** dan **Rp.0**. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Tahun 2023 dan Tahun 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0		
Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	
JUMLAH	0	0	

Beban

Penyusutan dan

Amortisasi

Rp.2.2.3.317.535.

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.2.203.317.535.** dan **Rp.2.862.258.226..** Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	926.976.765	1.550.569.070	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	937.777.989	736.309.366	-
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan		-	
Beban Penyusutan Irigasi	18.270.406	1.589.436	-
Beban Penyusutan Jaringan	121.143.215	118.476.548	-
Jumlah Penyusutan		2.406.944.420	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	150.394.840	161.528.000	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	48.754.320	-	-
Jumlah Amortisasi		161.528.000	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.203.317.535	2.568.472.420	-

Beban Penyisihan

Piutang Tak

TertagihRp.0

D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,-.

Beban Lain-lain

Rp.0

D.10 Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp,0 dan Rp.0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan Non
Operasional
200.644.478

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsientitas. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional per Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 20212	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	-	
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	-	
Penerimaan kembali belaja barang YAYL	-		
Pendapatan pelepasan aset non lancar	164.569.998	9.301.728	
Beban kegiatan non operasional lainnya	36.074.480	0	-
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	200.644.478	9.301.728	-

**)Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Aku nini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

Pos Luar Biasa
Rp.0

D.12 Pos Luar Biasa

PosLuar Biasa Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,-dan Rp. 0,-.

Pos Luar biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.